BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang masih belum berhasil mengupayakan pembangunan guna mengatasi peningkatan angka kemiskinan di kalangan masyarakat.[2] Kemiskinan menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi di tengah kondisi sosial ekonomi yang ditandai oleh sistem perekonomian yang tidak adil, adanya stratifikasi sosial yang kuat, praktik korupsi pemerintahan, serta kebijakan yang cenderung menguntungkan pemilik modal. Selain itu, kemiskinan juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, kondisi kesehatan, maupun kekurangan modal. Namun, kemiskinan seringkali diperburuk oleh sikap malas dan kebiasaan menyerah pada keadaan.[3]

Masyarakat dengan keadaan miskin mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kondisi ini juga pernah terjadi pada masa Jahiliyah, ketika masyarakat dengan kejam membunuh anak-anak mereka karena adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan yang disebabkan oleh kemiskinan. Hal tersebut biasa terjadi di kalangan bangsa Arab

[2] Arifa Kurniawan dan Oza Restianita, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2014-2023," *Ekoma : Jurnal Ekonomi* 3, no. 4 (2024), 1114.

[3] Sutiyo dan Hasna Azmi Fadhilah, *Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 9.

yang mempunyai tingkat perekonomian yang rendah.[4] Kehidupan masyarakat miskin dipenuhi perasaan kecemasan, kegelisahan, dan kesedihan. Dalam kondisi tersebut, Islam hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, tertuang dalam pedoman ajaran islam. Ajaran islam mendorong setiap umatnya untuk melakukan kegiatan muamalah, seperti kegiatan perekonomian dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah.[5] Islam memberikan motivasi kepada seluruh umat agar mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kekayaan melalui usaha yang sah serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[6] Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal, di mana setiap manusia diperintahkan untuk bekerja keras sesuai kemampuannya, sebab Allah telah menjanjikan kelapangan setelah kesempitan bagi siapapun yang bersabar dan berikhtiar. Sebagaimana tertuang pada Surat At-Talaq (65): ayat 7:[7]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ

نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

Artinya: Setiap orang yang memiliki kelapangan rezeki diwajibkan menafkahkan hartanya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Sedangkan,

[4] Nuraini H. A. Mannan, *Masa Jahiliah* (Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2021), 55.

[5] Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 9.

[6] Sigit Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 74.

[7] Muhammad Julijanto, *Membangun Keberagaman Mencerahkan Dan Mensejahterakan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 144.

seseorang yang mengalami keteterbatasan rezeki sebaiknya berbagi rezeki berdasarkan segala anugerah yang telah diberikan-Nya kepadanya. Setiap individu oleh Allah diberikan beban sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan setelah masa kesempitan, Allah akan memberikan kelapangan.

Surat At-Talaq ayat 7 menjelaskan bahwa Allah telah berjanji jika "sesudah kesulitan akan ada kemudahan". Berdasarkan konteks kekayaan, ini mengajarkan agar muslim tetap optimis, bekerja keras, dan tidak berputus asa meski dalam kondisi miskin. Allah dapat membolak-balikkan keadaan, namun tetap harus diiringi usaha agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Salah satu bukti keberhasilan penerapan ekonomi syariah yaitu gambaran kesejahteraan masyarakat Yaman pada periode pemerintahan Umar bin Khatab. Hal ini terbukti dari laporan Gubernur Mu'adz bin Jabal yang tidak menemukan lagi warga yang berhak menerima zakat, karena kebutuhan masyarakat telah tercukupi.[8]

Sistem ekonomi islam pada masa Umar Bin Khattab merupakan puncak keemasan sejarah islam yang memberikan kemakmuran cukup tinggi bagi umat islam. Kemakmuran ini ditandai dengan kehidupan yang bebas dari kesulitan dan masalah kemiskinan.[9] Kondisi kejayaan umat Islam pada masa itu sangat bertolak belakang dengan kondisi kebanyakan negara Muslim saat ini, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut terlihat dari data BPS Nasional yang menunjukkan

[8] Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 10.

[9] Riska Prasasti, "Baitul Maal, Kesejahteraan, Isu Kemiskinan: Perspektif Umar Tentang Manajemen Lembaga Keuangan," *Jurnal Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, no. 01 (2024): 33.

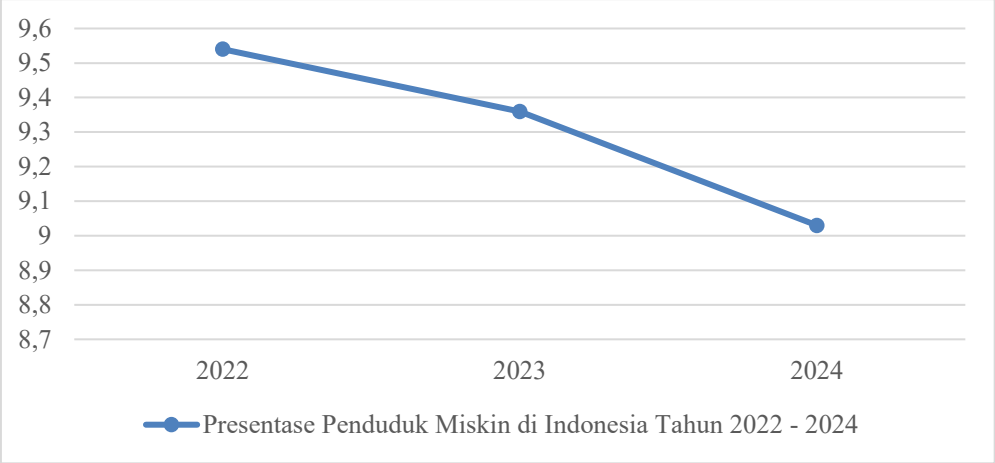
pada 2024 total masyarakat kurang mampu Indonesia tercatat sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang dari keseluruhan populasi Indonesia.[10] Selain itu, jumlah Pengangguran Terbuka pada 2024 sebesar 4,91% dari keseluruhan angkatan kerja yang ada. Angka kemiskinan dan pengangguran ini tentunya mengindikasi bahwa negara kita belum mencapai kesejahteraan. [11]

Kesejahteraan adalah impian setiap negara, sehingga harus terus menerus diupayakan. Selaras dengan ajaran agama Islam, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan UUD RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1-4 mengenai kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak yang mengalami penelantaran menjadi tanggung jawab negara, meningkatkan jaminan hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, serta menyediakan fasilitas yang layak baik pada layanan umum maupun kesehatan. Pelaksanaan dari ketentuan ini diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, di Indonesia permasalahan kemiskinan hingga kini belum mampu teratasi seluruhnya. Gambaran hasil upaya pengurangan kemiskinan bisa dilihat melalui persentase masyarakat miskin di Indonesia sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

[10] Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI Tentang Profil Kemiskinan Di Indonesia Per Maret 2023," *Badan Pusat Statistik*, no. 50 (2024): 1–16, https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,yang sebesar 7%2C53 persen.

[11] Tingkat Pengangguran Terbuka, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024," no. 83 (2024): 2.

Gambar 1. 1 Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (Data Diolah)[12]

Berdasarkan gambar 1.1, Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022-2024. Nilai kemiskinan tahun 2022 yaitu 9,54%, selanjutnya tercatat menurun di tahun 2023 senilai 9,36%, dan kembali turun mengalami penurunan di tahun 2024 senilai 9,03%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor utama dalam perekonomian. Berdasarkan konteks penelitian ini, penurunan angka kemiskinan tersebut berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional turut meningkatkan aktivitas produksi dan distribusi, sehingga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkontribusi pada meningkatnya penyerapan

[12] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2022-2024," *Berita Resmi Statistik*, https://www.bps.go.id/site/resultTab.

tenaga kerja, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin.

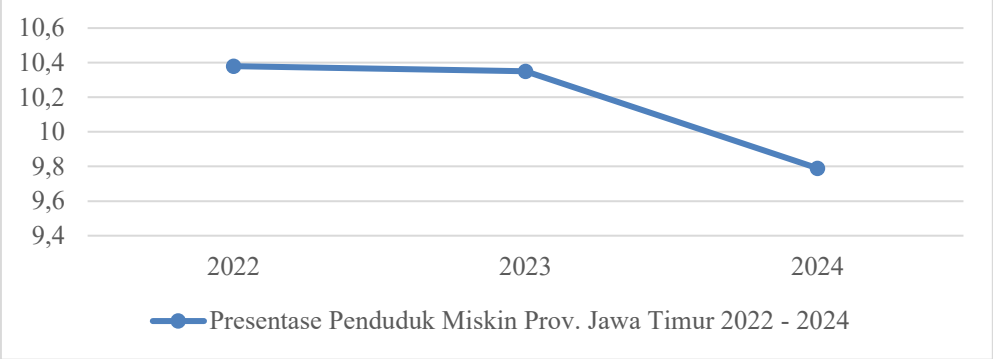
Penurunan angka kemiskinan ini merupakan suatu hasil dari upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Melalui kebijakan fiskal, moneter, atau makroprudensial, pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi. Penduduk usia produktif, keluarga, kesehatan dan bisnis yang terdampak terfokuskan di kebijakan fiskal. Kebijakan moneter menghindari kegagalan usaha yang menyebabkan banyaknya PHK. Sedangkan Bank sentral berupaya menjaga stabilitas keuangan dengan berdasar pada kebijakan makroprudensial.[13]

Kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga tantangan di tingkat daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan penopang perekonomian nasional yang mempunyai keseluruhan populasi penduduk dengan jumlah paling tinggi kedua di Indonesia tahun 2024 sebesar 41,81 juta penduduk.[14] Perekonomian Jawa Timur terus berkembang dari waktu ke waktu, tetapi masalah kemiskinan masih belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini tercermin dalam besaran nilai penduduk miskin Jawa Timur.

[13] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Buku Seri 2 Strategic Foresight BPK Kebijakan: Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, Dan Kepemimpinan Di Masa Dan Pascapandemi Covid-19: Pandangan Pengambil Kebijakan Di Tingkat Pusat Dan Daerah*, *Richard III* (Jakarta: Buku Kompas, 2019), 84, doi:10.2307/j.ctvqc6ghn.14.

[14] badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Jawa Timur Province in Figures 2024* (Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024), 53.

Gambar 1. 2 Presentase Penduduk Miskin Prov. Jawa Timur 2022 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022-2024 (data diolah)[15]

Persentase penduduk miskin pada gambar 1.2 menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya. Penurunanan tersebut sekitar 10,38% di 2022, 10,35% di tahun 2023, dan mencapai 9,79% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur berlangsung secara bertahap, dengan akselerasi penurunan yang mulai terlihat pada tahun terakhir. Penurunan yang terjadi menggambarkan kebijakan pengembangan dan penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan dampak positif. Meskipun upaya untuk menekan angka kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah masih tetap diperlukan.

Berdasarkan konteks penelitian ini, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan dalam memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, meskipun perlu diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, pengendalian Tingkat

[15] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Jawa Timur Maret 2022-2024," *Berita Resmi Statistik*, https://www.bps.go.id/site/resultTab.

Pengangguran Terbuka (TPT) juga memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sehingga, ketiga variabel tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor eksternal yang memengaruhi kemiskinan, yang kemudian berinteraksi dengan faktor internal individu dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan dipengaruhi oleh faktor yang bersumber dari internal dan eksternal. Minimnya pendidikan berasal dari dalam diri seseorang yang termasuk dalam unsur internal. Sedangkan unsur eksternal berasal dari kondisi luar individu. Kedua unsur saling memberikan pengaruh pada akses individu yang berada dalam kategori miskin. Miskin yang dimaksud adalah kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraannya.[16]

Indeks Pembangunan Manusia sama artinya dengan *Human Development Indeks*. IPM digunakan sebagai dasar dalam mengkategorikan tingkat kemajuan suatu negara ke dalam kelompok negara maju, berkembang, maupun tertinggal. Selanjutnya IPM juga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam meninjau pengaruh regulasi ekonomi dalam meningkatkan mutu kehidupan seluruh masyarakat.[17]

---

[16] Salsabilla Aurelia Pratiwi, Ghea Cantika Noorsyarifa, dan Nurliana Cipta Apsari, "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (2022): 73, doi:10.24198/focus.v5i1.39965.

[17] Mirza Fuady, Muhammad Rafi Farrel Fuady, dan Fahmi Aulia, "Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesa," *Jurnal Tata Loka* 24, no. 4 (2022): 335, doi:10.14710/tataloka.24.4.330-337.

Gambar 1.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 - 2024



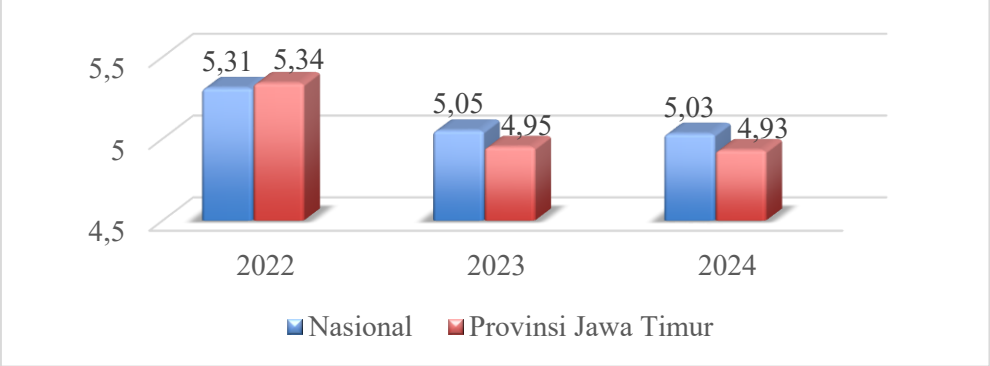
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (data diolah)[18]

Berdasarkan gambar 1.3, terjadi peningkatan IPM dari tahun 2022 sampai 2024, baik dalam skala nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022, angka IPM Nasional tercatat 72,91% lebih tinggi sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang berada di angka 72,75%. Jawa Timur saat itu masih tertinggal dari rata-rata Nasional. Namun, di tahun 2023, Jawa Timur berhasil melakukan kemajuan signifikan dengan capaian IPM sebesar 74,65%, lebih tinggi sebesar 0,26% dibandingkan dengan nasional yang berada di angka 75,02%. Sedangkan pada tahun 2024, Jawa Timur juga unggul sebesar 0,33% dibandingkan dengan nasional. Realitas ini menggambarkan terdapat perbaikan kualitas manusia di Jawa Timur yang lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. Sehingga Jawa Timur mampu mengejar ketertinggalan dan mampu mempertahankan keunggulannya selama dua tahun terakhir.

[18] Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022-2024," *Berita Resmi Statistik*, https://www.bps.go.id/site/resultTab .

Indeks Pembangunan Manusia berkaitan erat dengan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian berperan penting dalam mengkaji pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan perekonomian menggambarkan adanya penguatan pendapatan negara dikarenakan adanya kenaikan pendapatan per kapita pada jangka waktu perhitungan tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi dan berimplikasi pada tingginya kesejahteraan penduduk.[19] Selain itu, peningkatan perekonomian mencerminkan perbaikan kondisi perekonomian negara, yang terjadi secara berkelanjutan selama periode tertentu.[20] Pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya perkembangan kegiatan perekonomian atau kenaikan pendapatan nasional pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya, biasanya satu tahun.[21]

Gambar 1. 4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (data diolah)[22]

[19] Marselino Wau, Leni Wati, dan Jhon Firman Fau, *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 9.

[20] Sri Nur Mulyati, *Modul Pembelajaran SMA Ekonomi* (Bandung: Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, 2020), 3.

[21] Immas Nurhayati, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Depok: Khalifah Mediatama, 2016), 17.

[22] Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2022-2024," *Berita Resmi Statistik*, https://www.bps.go.id/site/resultTab .

Berdasarkan gambar 1.4, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 senilai 5,34% lebih unggul 0,03% dibanding skala nasional senilai 5,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun itu perekonomian Jawa Timur berjalan cukup baik. Namun, pada tahun 2023 terdapat penurunan perekonomian baik skala nasional maupun daerah. Ekonomi Jawa Timur berada di angka 4,95% lebih rendah sebesar 0,1% dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,05%. Penurunan ini terus berlanjut di tahun 2024, di mana pertumbuhan nasional sebesar 5,03% lebih unggul 0,1% jika dibandingkan Jawa Timur yang berada di angka 4,93%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kinerja ekonomi di Jawa Timur, sehingga selama 2022 sampai dengan 2024 posisinya lebih rendah dibandingkan rata-rata Indonesia.

Peningkatan perekonomian merupakan indikasi keberhasilan ekonomi.[23] Salah satu alat ukur untuk menilai baik buruknya keadaan ekonomi yaitu melalui Tingkat Pengangguran Terbuka.[24] TPT semakin meningkat mengakibatkan semakin tingginya tingkat pengangguran pada suatu daerah. Tingginya TPT menggambarkan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara.[25]

[23] Nurhayati, *Pengantar Ekonomi Mikro*, 18.

[24] Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 148.

[25] Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium* 10, no. 02 (2021): 123.

Gambar 1. 5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024 (data diolah)[26]

Berdasarkan gambar 1.5, Tingkat Pengangguran Terbuka baik tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Timur mengalami kecenderungan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, TPT nasional mencapai 5,86%, lebih tinggi sebesar 0,37% dibandingkan dengan Jawa Timur yang tercatatat sebesar 5,49%. Pada tahun 2023, TPT nasional maupun Jawa Timur mengalami penurunan dengan ekonomi nasional lebih unggul 0,44% yaitu sebesar 5,32%, sementara Jawa Timur sebesar 4,88%. Penurunan ini berlanjut di tahun 2024, di mana TPT nasional 4,91% lebih unggul 0,72% dibandingkan Jawa Timur yang berada di angka 4,19%. Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran yang cenderung lebih baik daripada skala negara selama 2022-2024. Hal ini mungkin mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi pasar kerja di Jawa Timur, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun

[26] Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022-2024," *Berita Resmi Statistik*, https://www.bps.go.id/site/resultTab .

perkembangan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong penurunan jumlah tenaga kerja menganggur dengan lebih pesat dibanding skala nasional.

Penelitian Praja, Muchtar, dan Sihombing pada tahun 2023 menunjukkan adanya pengaruh simultan pada variabel IPM, TPT, laju pertumbuhan penduduk dan jumlah kemiskinan. Sedangkan dengan individu, TPT dan peningkatan perekonomian berpengaruh positif dan signifikan pada jumlah kemiskinan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif tidak signifikan pada kemiskinan. Kondisi tersebut menandakan perlu adanya peran pemerintah untuk membuat kebijakan guna mengurangi pengangguran dan menekan laju pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan.[27]

Terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Penelitian oleh Aldianto[28] menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Perbedaan arah dan tingkat signifikansi pengaruh antarvariabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara IPM, pertumbuhan ekonomi, dan TPT terhadap kemiskinan masih belum konsisten. Kondisi ini

[27] Rama Bhaskara Praja, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta," *Ecoplan* 6, no. 1 (2023): 78–86, doi:10.20527/ecoplan.v6i2.656.

[28] Fahmi Alif Aldianto, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Angka Kemiskinan Dari Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024).

mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, khususnya dalam konteks wilayah dan periode yang berbeda.

Peneliti memilih periode Tahun 2022-2024 dikarenakan pada masa ini termasuk pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, dimana pemerintah mulai menjalankan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Rentang waktu 2022-2024 terjadi perbaikan yang signifikan pada beberapa indikator makro ekonomi seperti peningkatan IPM, penurunan TPT, dan penurunan angka kemiskinan baik secara nasional maupun Jawa Timur. Melalui analisis data selama tiga tahun pasca pandemi Covid-19, penelitian ini dapat menggambarkan dampak nyata kebijakan pemulihan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana prinsip ekonomi syariah dapat dijadikan solusi dalam mengurangi kemiskinan pada suatu daerah.

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai objek penelitian karena meskipun selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan, pada tahun 2024 Jawa Timur masih menempati posisi teratas dengan jumlah penduduk miskin mencapai 3,983 juta jiwa atau sebesar 9,79%. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Jawa Timur belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, meskipun terjadi penurunan, kemungkinan fluktuasi masih dapat terjadi karena tren yang menurun tidak menjamin keberlanjutan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan fakta empiris yang telah dianalisis, diperlukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh dengan kemiskinan di Jawa Timur. Oleh sebab itu, peneliti berharap temuan penelitian dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah terkait dalam menekan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, judul penelitian ini yaitu "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang sebelumnya, masalah yang teridentifikasi dalam kajian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Rendahnya IPM dan Pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan TPT secara simultan berdampak pada kenaikan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2022-2024
b. Rendahnya IPM berdampak pada kenaikan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2022-2024
c. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi berdampak pada kenaikan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2022-2024
d. Meningkatnya TPT berdampak pada kenaikan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2022-2024

2. Pembatasan Masalah

Hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan menggambarkan cukup luasnya ruang lingkup permasalahan yang dihadapi. Namun

peneliti memberikan batasan masalah dengan tiga unsur yang mempunyai pengaruh terhadap angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2022-2024 terdiri dari: IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks pemaparan latar belakang, inti masalah penelitian ini dapat diringkas dalam uraian berikut:

1. Apakah IPM, Pertumbuhan Ekonomi, TPT secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2022 hingga 2024?
2. Apakah IPM memiliki pengaruh terhadap Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu 2022 hingga 2024?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu 2022 hingga 2024?
4. Apakah TPT memiliki pengaruh terhadap Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2022 hingga 2024?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang akan diraih melalui kajian ini meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan TPT secara simultan terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2022 hingga 2024.

2. Untuk menguji pengaruh IPM terhadap angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2022 hingga 2024.
3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2022 hingga 2024.
4. Untuk menguji pengaruh TPT terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2022 hingga 2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

   Diharapkan temuan ini mampu menghasilkan kontribusi baik dari segi teoretis maupun akademis, berfungsi sebagai tambahan referensi data dan mendukung kemajuan pengetahuan, terutama di ranah analisis ekonomi yang menyoroti dampak IPM, Pertumbuhan Ekonomi, serta TPT pada nilai kemiskinan. Selain itu, hasil riset dapat dijadikan dasar oleh para peneliti mendatang untuk memperluas pengetahuan seputar perkembangan sosial dan kesejahteraan warga. Berikutnya, kajian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi praktis pada pemerintah setempat guna merancang langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin.

2. Secara praktis

   a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

      Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber rujukan tambahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah sebagai pengambilan kebijakan dengan berdasar pada IPM, Pertumbuhan

Ekonomi, TPT, dalam upaya menekan kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, temuan penelitian juga dapat memberikan gambaran nyata mengenai indikator utama yang mempunyai pengaruh terhadap angka kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

b. Bagi Pihak Akademis

Riset diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi di bidang ekonomi syariah. Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil riset juga diharapkan mampu memperluas kepustakaan ilmiah yang dapat mendukung penguatan teori dan praktik ekonomi syariah di lingkungan perguruan tinggi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnyanya

Riset diharapkan mampu dijadikan tambahan pengetahuan serta sumber rujukan peneliti berikutnya yang mengkaji mengenai permasalahan kemiskinan. Selain itu, peneti berharap riset dapat memberikan persepktif baru yang dapat memperluas analisis dalam penelitian sejenis. Temuan penelitian juga dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan studi lanjutan dengan lebih mendalam dan komprehensif.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2024 sebagai objek penelitian. Adapun variabel penelitiannya adalah:

a. Tiga variabel bebas meliputi: Indeks Pembangunan Manusia (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3).
b. Satu variabel terikat yaitu Angka Kemiskinan (Y).

G. Penegasan Variabel

A. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang mengakibatkan ketidakmakmuran individu untuk mencukupi kebutuhan primernya.[29] Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi ketika individu tidak bisa mencukupi kebutuhan primer yang terdiri dari pangan, sandang, papan, tingkat hidup sehat, serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan dan melakukan aktivitas kerja. Kebutuhan dasar tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi atau moneter yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Penduduk kurang mampu akan mempunyai penghasilan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan.[30]

---

[29] Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, 155.

[30] Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2014* (Maluku Utara: BPS Provinsi Maluku Utara, 2015), 8.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator untuk menilai perbedaan harapan hidup, melek hidup, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara disebut dengan IPM.[31] Berbagai upaya pembangunan manusia dilakukan melalui peningkatan taraf hidup, seperti penguatan SDM, derajat kesehatan, dan optimalisasi pemanfaatan SDA. Melalui upaya pembangunan tersebut, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata dan berjangka panjang. Indikator ini telah digunakan berbagai negara untuk mengindentifikasikan kemajuan pembangunan suatu negara atau daerah.[32]

IPM adalah indikator statistik guna mengevaluasi kemajuan taraf hidup suatu penduduk. Melalui IPM, para pemangku kepentingan dapat menyempurnakan regulasi terkait program pembangunan dalam jangka panjang. Melalui IPM dapat diketahui perbandingan kualitas pembangunan SDM antar suatu daerah. Berdasarkan ketimpangan dan permasalahan tersebut, pemerintah dapat mengembangkan regulasi terkait peningkatan kualitas manusia di suatu negara.[33]

c. Pertumbuhan Ekonomi

Suatu daerah mengalami peningkatan jumlah output barang dan jasa pada periode tertentu disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

---

[31] Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia* (Jakarta: Indocamp, 2018), 8.

[32] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), 6.

[33] *Ibid*., 7.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan positif yang terjadi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun daerah pada periode tahunan berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai melalui peningkatan pendapatan per kapita, yakni besarnya PDB yang diterima setiap individu, sebagai cerminan kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. [34]

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Individu yang termasuk usia produktif namun tidak mempunyai pekerjaan tergolong pada jenis pengangguran terbuka. Meskipun mereka masih berusaha memperoleh pekerjaan.[35] TPT dapat berguna menilai jumlah angkatan kerja yang belum termanfaatkan pada sektor ketenagakerjaan. TPT menggambarkan jumlah penduduk usia produktif, tetapi belum mendapatkan kesempatan kerja.[36]

Pengangguran terbuka menggambarkan jumlah penduduk usia produktif yang belum memperoleh kesempatan kerja serta mencerminkan rendahnya daya serap lapangan usaha. Selain itu, kemampuan pasar kerja untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja juga dapat diketahui melalui besaran pengangguran terbuka. Perhitungan TPT dilakukan dengan membagi jumlah penduduk menganggur dengan total penduduk usia kerja.[37]

---

[34] Mohammad Abdul Mukhyi, *Teori Ekonomi* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 121.

[35] Beni Kurniawan, *Perekonomian Indonesia* (Tangerang Selatan: Al Fath Zumar, 2014), 20.

[36] Badan Pusat Statistik, *Statistik Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021* (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021), 9.

[37] *Ibid*., 31.

B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian berjudul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur" menjelaskan mengenai bagaimana IPM (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan TPT (X3) dapat memberikan pengaruh terhadap Angka Kemiskinan (Y). Semua data variabel penelitian berasal dari data publikasi BPS Provinsi Jawa Timur dari 2022 hingga 2024.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang memaparkan ringkasan tentang (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi dan batasan masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, dan (f) penegasan istilah.

Bab II berisi Landasan teori, memaparkan secara singkat mengenai (a) kerangka teori, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka pemikiran, dan (d) hipotesis penelitian.

Bab III berisi metode penelitian, memaparkan secara singkat mengenai (a) pendekatan dan jenis pendekatan, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e) analisis penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian yang memaparkan secara ringkas tentang (a) profil dan objek penelitian, serta (b) hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, memaparkan secara singkat mengenai: (a) pembahasan dan (b) implikasi hasil penelitian.

Bab VI, Sebagai akhir bab yang berisi: Penutup (a) Kesimpulan dan (b) saran.